

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, dalam perkembangannya Indonesia memerlukan banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia negara maju, salah satunya adalah terciptanya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat dan melancarkan beberapa program kerja pemerintahan. Pada era globalisasi sekarang diketahui bahwa masyarakat menginginkan segala sesuatu yang instan, karena itu pemerintah mengadakan beberapa program kerja antara lain mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Tujuan utama Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah yang terendah dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia (Aprida 2019).

Desa merupakan perwujudan penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa memegang peranan penting dalam Pembangunan Nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Pada masa lampau Desa merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.

Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah di republik ini, secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak dari pada kelurahan. Meskipun telah dilakukan kegiatan pembangunan di desa namun masih banyaknya desa tertinggal dilihat dari ketersediaan sarana prasarana. Selain itu desa secara kuantitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Kewenangan Desa dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 disebutkan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk

meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.

Menurut (Ariadi 2019) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong pertumbuhan prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan ataupun nasional.

Pembangunan Desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan Desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Pada pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat untuk masyarakat, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Usaha peningkatan kualitas sumber daya desa dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan dari suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, serta membenahi pelayanan publik yang masih kurang baik. Adapun program yang menjadi perhatian Pemerintah Desa Srimukti adalah perbaikan infrastuktur fisik. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur di desa diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan hidup yang layak.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Srimukti Kepala Desa Srimukti dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai pemegang peranan yang menentukan. Sebagai pemimpin tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. (Ariadi 2019)

Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelebagaan. Sedangkan penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat Desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintah Desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi secara meluas dan efektif.

Saat ini masalah infrastruktur fisik menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan. Keberhasilan atau kegagalan dalam peningkatan pembangunan fisik di suatu desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin dalam suatu wilayah pedesaan, yang merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, mengkomunikasikan, mengorganisasikan, dan melaksanakan.

Berdasarkan yang telah diterangkan dalam latar belakang diatas, pengidentifikasian masalah terkait dengan judul adalah :

1. Pembangunan Infrastruktur fisik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pembangunan infrastruktur fisik dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Dengan membangun atau memperbaiki prasarana akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat.

Tabel 1.1

**Daftar Perencanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Srimukti  
Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi TA. 2023**

NO	URAIAN KEGIATAN	KODE KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Utama Desa Srimukti	61d80a33e824a	RT.04/05 s.d RT 01/06	800 m
2	Penerangan Jalan Utama (PJU) Desa Srimukti	61d803721ca59	Dusun 1 sd 3	3000 m
3	Pengaspalan Jalan Utama Desa Srimukti	61d7fc3f0b199	Dusun 1	800 m
4	Pengaspalan Jalan Utama Desa Srimukti	61dfa6348fa90	Dusun 2	800 m
5	Pengaspalan Jalan Utama Desa Srimukti	61dfa81eed251	Dusun 3	800 m
6	Pengaspalan Jalan Samping Kantor Desa Srimukti	61dfac0d11945	RT.004/004	300 m
7	Pemasangan Uditch Samping Kantor Desa Srimukti	61dfad3cd1933	RT.004/004	300 m
8	Pemasangan Uditch Jalan Utama Kantor Desa Srimukti	61dfaec0f39e5	RT.004/004	500 m
9	TPT Jalan Utama Desa Srimukti	61dfd5f6ea069	RT.04/05 s/d RT 02/06	800 m
10	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Srimukti	61dfd75a59951	RT.02/06 s.d RT 05/06	300 m

*Sumber : Arsip Desa Srimukti 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa dari proses Perencanaan pembangunan di Desa Srimukti masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur fisik. Hal itu terjadi karena pembangunan di Desa tiap tahunnya sama, lebih terfokus ke sarana jalan raya dan lainnya sedangkan infrastruktur lain seperti penerangan jalan, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Seolah sarana lainnya hanya sebatas usulan saja dan tidak pernah di laksanakan perbaikannya. Dampak negatif akibat kurang perhatian pada pembangunan desa dalam bidang infrastruktur di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yaitu keterbelakangan perekonomian di pedesaan dan minimnya sarana dan prasarana, dengan dibuktikannya masih ada saja jalan-jalan yang rusak, lembaga pendidikan dan gedung-gedung sekolah yang masih terbatas jika hal ini dibiarkan akan mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat Desa Srimukti dalam

beraktivitas. Peran kepala desa sangat diharapkan sebagai kepala pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di bidang infrastruktur

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi Kepala Desa Srimukti dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

## **1.4. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

#### **1.4.1. Signifikansi Akademik**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan keilmuan khususnya dalam kajian pemerintahan dan kajian akademis di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Kota Bekasi.

Dalam memahami Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik, penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan membahas tema yang sama yaitu terkait Kepala Desa. Penelitian tersebut diantaranya yaitu :

*Pertama*, Arifuddin Syah Putra. Yang berjudul “Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis”. 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dan kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan sudah sangat baik. Untuk faktor penghambat pembangunan infrastruktur yaitu adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah dan hambatan lain yaitu cuaca, Peran Kepala Desa dalam indikator Perencanaan Pembangunan Desa sudah baik karena Pemerintah Desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dalam Pelaksanaannya Peran Kepala Desa juga dikatakan baik dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada Pengawasan Peran Kepala Desa juga dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa serta BPD melakukan pengawasan secara bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.



**Kedua,** Vivit Aprida. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sorkam Tengah”. 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa di Desa Sorkam Tengah dalam Pelaksanaan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Sorkam Tengah secara umum masih kurang optimal sehingga capaian untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenangnya serta kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pembangunan yang belum terealisasi seperti pembangunan gorong-gorong yang tanggung, pembangunan pembatas parit, dan tidak ada keterbukaan atas informasi kepada masyarakat yang membuat minimnya peran aktif Kepala Desa Sorkam dalam menggerakkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

**Ketiga,** Supriadin Amir. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Palamea Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan”. 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Palamea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa palamea sudah sangat baik apabila ditinjau dari beberapa indikator seperti : 1. Peran dalam memotivasi (Motivator) sudah diterapkan dengan baik, 2. Peran sebagai fasilitator sudah diterapkan dengan baik, dan 3. Peran sebagai mobilisator sudah diterapkan dengan baik juga.

**Keempat,** H. Hariyanto. Yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”. 2021. Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indikator awal berhasil atau tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan

perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.

*Kelima*, Bakhtiar. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”. 2021. Dalam penelitian ini ada tiga kelompok penting sebagai Kepala Desa dalam pembangunan di Kecamatan Mekarsari khususnya yaitu sebagai pelopor, sebagai innovator dan sebagai stabilisator. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Mekarsari tentang Peran Kepala Desa dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1). Kepala Desa sebagai Pelopor

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa dapat diketahui Peran Kepala Desa sebagai pelopor dalam pembangunan desa adalah menjadi sebagai pemimpin rapat, mengusulkan pembangunan dan mengajukan peraturan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa dan ditetapkan bersama BPD serta melaksanakan wewenang sesuai undang-undang.

2). Kepala Desa sebagai Inovator

Berdasarkan hasil wawancara Peran Kepala Desa sebagai Inovator yaitu dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan mengkoordinasikan pembangunan desa.

3). Kepala Desa sebagai Stabilisator

Berdasarkan hasil wawancara, peran Kepala Desa sebagai stabilisator dalam pembangunan desa yaitu dengan melakukan perwakilan desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membina ketertiban masyarakat, menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan atau salah paham antar warga dan desa, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat.

**Keenam.** Lutiya Ningrum dkk. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa terhadap pembangunan sektor pertanian komoditas padi organik di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini diketahui jika Kepala Desa Wates mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan pertanian di Desa Wates, yaitu ditunjukkan dengan:

- 1) Kepala Desa dapat membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- 2) Kepala Desa selalu memberikan pengarahan kepada perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan.
- 3) Kepala Desa akan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
- 4) Kepala Desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.
- 5) Kepala Desa mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.

**Ketujuh.** Selni Paru dkk. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu”. 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan pernyataan informan hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.

***Kedelapan.*** Wayan Mahayana. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”. 2013. Penelitian ini menyoroti tentang Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Peneliti menemukan temuan yang menunjukkan bahwa Kepala Desa sangat berperan dalam memotivasi, memfasilitasi, dan menggerakkan warga disetiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Dalam perannya temuan juga menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa yang paling sering terlihat atau peran yang paling menonjol yaitu Kepala Desa sebagai fasilitator. Hal ini terlihat bahwa Kepala Desa sering memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan Pembangunan desa di Desa penelitian yakni di Desa Bumi Rapak.

***Kesembilan.*** Jhon Buni M. Yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Kabupaten Sumba Barat”. 2023. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa di Desa Soba Rade Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan Pembangunan Desa. Hal ini menyebabkan masih banyak agenda desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana.

***Kesepuluh.*** Irwan Saputra dkk. Yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Santu’un Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”. 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di lokasi penelitian. Sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Satu’un sudah baik. Dan faktor penghambat Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa adalah dana yang bertahap dari Pemerintah dan sebagian dari program ada yang tidak terlaksana dengan baik.

Pada penelitian kali ini peneliti mengelaborasi sepuluh riset tersebut untuk menambah literatur. Dari sepuluh penelitian diatas menjelaskan berbagai fenomena tentang Peran Kepala Desa dan Pembangunan Desa. Berkembangnya suatu pembangunan di Desa terjadi apabila Peran Kepala Desa sudah dijalankan dengan baik dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, tentu saja dengan kerjasama yang baik dan transparan dengan Pemerintahan Desa. Untuk mengetahui lebih dalam lagi akan hal tersebut, maka peneliti menentukan bahasan ini. Karena Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu desa, tentu saja pasti mempunyai pengaruh yang besar dalam terlaksananya Pembangunan di Desa.

Secara akademik penelitian ini adalah salah satu bentuk tugas individu yang bersifat untuk membangun dan menambah wawasan pemikiran. Dengan penelitian ini peneliti bisa mengetahui lebih dalam tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.

#### **1.4.2. Signifikansi Praktis**

Signifikansi ini merupakan syarat untuk mendapatkan strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi, selain itu untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini bisa untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada Kepala Desa di Desa Srimukti manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan agar mobilitas masyarakat membaik dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisikan perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitiann yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat, dan jelas tentang penelitian tersebut.